



**Judul** : RUU Ormas Dibawa ke Paripurna  
**Tanggal** : Kamis, 20 Juni 2013  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 2

# RUU Ormas Dibawa ke Paripurna

■ Ira Sasmita

JAKARTA — RUU Ormas segera ditentukan dalam rapat paripurna DPR pada 25 Juni 2013 mendatang. Meski begitu, satu fraksi, yakni Fraksi PAN, masih belum menyetujui RUU tersebut.

Pada rapat akhir Pansus RUU Ormas, Rabu (19/6), Fraksi PAN menyatakan RUU Ormas belum layak dibawa ke paripurna. “Memang tinggal satu fraksi (yang menolak). Mungkin kami akan lobi dan berkomunikasi intensif dengan pimpinan Fraksi PAN. Masih ada waktu sebelum tanggal 25,” kata Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Malik optimistis PAN akan setuju dengan RUU Ormas. Ini lantaran dalam pandangan akhir Fraksi PAN, beberapa poin keberatan sebenarnya telah diakomodasi.

RUU yang telah dibahas selama enam kali masa sidang DPR itu, lanjut Malik, diperkirakan sudah laik untuk segera disahkan di paripurna. Menurut Malik, penolakan RUU Ormas oleh PAN adalah menyangkut asas tunggal dan mekanisme sumbangan bagi ormas. “Misalnya, keberatan-keberatan tentang asas tunggal, tentang sumbangan, tentang pendaftaran ormas. Semuanya sudah diakomodasi,” ungkapnya.

Politikus dari PKB itu juga mengaku telah berdialog dengan pimpinan-pimpinan ormas yang cukup vokal menyerukan penolakan terhadap RUU Ormas. Dari hasil diskusi dan pertemuan intensif tersebut, dia mengklaim kesepakatan mengenai RUU Ormas telah dicapai.

“Saya telah berbincang dengan Pak Din (Din Syamsuddin). Sudah kami jelaskan. Dan, ada enam hingga tujuh tuntutan Muhammadiyah yang kami masukkan,” ujarnya.

Karena itu, Malik optimistis setelah lobi dengan Fraksi PAN, RUU Ormas bisa disahkan pada Paripurna DPR 25 Juni 2013 nanti. Dia yakin RUU Ormas akan disetujui tanpa diwarnai penolakan dari anggota sidang, apalagi harus menempuh mekanisme voting.

Dalam pandangan akhir fraksi di Pansus RUU Ormas, delapan dari sembilan fraksi di DPR telah menyetujui RUU Ormas segera dibawa dan disahkan dalam Paripurna DPR. Fraksi PKS secara prinsip menyetujui dengan beberapa catatan.

Juru bicara dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi mengutarakan tujuh catatan dari PKS. Seperti kedudukan asas Pancasila, pengaturan pendaftaran tanpa memberatkan ormas, serta regulasi bagi warga negara asing yang ingin mendirikan ormas di Indonesia. Kemudian, PKS juga memandang sanksi bagi ormas yang melanggar lebih diarahkan pada pembinaan. ■ ed: abdullah sammy